

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA BINJAI

TESIS



Oleh

INDRIANI

NPM. 041801063

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2006**

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA BINJAI

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Pada Program
Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area



Oleh

INDRIANI

NPM. 041801063

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N
2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun Di Kota Binjai**

N a m a : Indriani

N I M : 041801063

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Humaizi, MA

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA BINJAI

N a m a : Indriani
N I M : 041801063
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Humaizi, MA
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupab bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan ayat (2) menyebutkan "Pemerintah mengprogramkan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang".i. Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan atas Program wajib Belajar Sembilan tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai, sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program digunakan metode skoring, yang yang dibagi atas tiga kriteria, yaitu : implementasi program baik, sedang dan rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keenam indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukan skor rata-rata dalam kategori baik (2,73). Demikian juga halnya apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa kecuali indikator hambatan yang termasuk kategori sedang, kelima indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai dapat dilaksanakan cukup efektif.

Key words : *Implementasi Kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Binjai”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang secara langsung membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu : Yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yakub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Admiistrasi Publik,
3. Bapak Drs. Humaizi, MA, sebagai Pembimbing I
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai Pembimbing II
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua,Suami Tercinta dan keluarga, yang tidak pernah putus mengalirkan do'a dan memompakan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata`ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Agustus 2006

P e n u l i s

Indriani



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Implementasi Kebijakan	7
2.2. Model Komunikasi Program	9
2.3. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	14
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian.....	23
3.2. Populasi Sasaran.....	23
3.3. Rencana Sample	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5. Operasionalisasi Variabel.....	25
3.6. Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Kota Binjai.....	27
4.1.1. Geografis	27
4.1.2. Keadaan Ekonomi.....	29
4.1.3. Keadaan Penduduk	31
4.2. Kondisi Pendidikan	32

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Penyajian Data	38
5.1.1. Karakteristik Responden	38
5.1.2. Data Variabel Penelitian.....	40
5.2. Analisa Data	64

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	66
6,2. Saran - Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

L A M P I R A N.....	70
----------------------	----

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan ayat (2) menyebutkan "Pemerintah mengprogramkan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang".

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah telah melaksanakan program Inpres Sekolah Dasar sejak Tahun 1973/1974 sebagai realisasi atas kebijaksanaan pemerataan pendidikan. Pada masa sepuluh Tahun telah dibangun secara besar-besaran gedung-gedung Sekolah Dasar di seluruh tanah air, sehingga sebagian besar anak usia 7-12 Tahun (usia SD) telah dapat ditampung di Sekolah Dasar. Selanjutnya pada Hari Pendidikan dan Pengajaran tanggal 2 Mei 1984 Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Wajib Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun. Sementara itu dengan terus menerus meningkatkan wajib belajar sekolah dasar 6 Tahun, pemerintah selalu berprogram mewujudkan sistem Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman pada undang-undang yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan amanat UUD 1945, pemerintah bersama-sama dengan

DPR mengundang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan dan Pengajaran.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan dan Pengajaran menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan", dan "Warga negara yang berumur 6 (enam) Tahun berhak mengikuti pendidikan dasar" dan selanjutnya bagi "Warga negara yang berumur 7 (tujuh) Tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat". Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan 9 (sembilan) Tahun, yang terdiri atas program pendidikan 6 (enam) Tahun di Sekolah Dasar dan Program Pendidikan 3 (tiga) Tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama".

Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Upaya untuk meningkatkan mutu/kualitas bangsa (sumber daya manusia) seperti telah dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dan dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan dan Pengajaran, senantiasa diprogramkan dari Tahun ke Tahun dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pelaksanaan wajib belajar Sekolah Dasar bagi anak usia 7-12 Tahun yang pada akhir Repelita IV, Tahun 1988/1989 telah mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 92,65% (dari 30.395.500 anak usia Sekolah Dasar), sedangkan jumlah

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1976, *Public Policy Making*, New York, Holt Rinechart and Winston.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis; An Introduction*, Englewood Clifs, New Jersey, Prentice-Hall Inc, Indonesian Edition: Pengantar analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Handayaniingrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Irfan Islamy, 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasmita, Ginanjar (1995) *Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sebuah Tinjauan Mengenai Lingkungan Kebijaksanaan (Policy Environment)*, LAN bekerjasama dengan UNPAD, Bandung.
- Kristiadi, J.B, 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21*, UNPAD, Bandung.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1981. *Effective Policy Implementation*. Toronto: D.C. Heath.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustopadidjaja, AR, 1992, *Studi Kebijaksanaan: Perkembangan dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
-, 1999, *Manajemen Proses Kebijaksanaan*, Jakarta Lembaga Administrasi negara-Republik Indonesia
- Pemerintah Kota Binjai, 2001. *Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Binjai Tahun 2001-2005*. Sekretariat Daerah Kota Binjai.

- Soetopo, 1999, *Kebijaksanaan Publik dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi negara - Republik Indonesia.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul, 1990. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

